



SELASA, 14 SEPTEMBER 2021

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Belanja Tidak Terduga Rp 46 Miliar

MUKOMUKO - Alokasi untuk belanja tidak terduga (BTT) Pemkab Mukomuko akan membengkak untuk tahun anggaran 2022. Jika tahun ini alokasi untuk BTT hanya Rp 5,89 miliar, tahun depan Pemkab Mukomuko wajib menyediakan minimal sekitar Rp 46 miliar.

Angka sebesar itu wajib dialokasikan jika tidak ada perubahan pada besaran APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran (TA) 2021, sebesar Rp 922,3 miliar. Namun jika besaran APBD tahun ini berubah turun saat di APBD Perubahan, maka Pemkab bisa mengalokasikan untuk BTT kurang dari jumlah tersebut.

Informasi mengenai kewajiban menyediakan BTT sejumlah itu dibenarkan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Mukomuko, Agus Sumarman, MM, M.PH. Jumlah itu kata Agus, setara 5 persen dari total APBD Mukomuko TA 2021. "Di BTT ini, tahun depan, itu salahsatunya digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19. Kisarannya itu sekitar Rp 45 miliar. Dan itu semuanya harus masuk dalam BTT," kata Agus.

Dasarnya, Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 910/4350/SJ tentang Kebijakan Dalam Penyusunan APBD TA 2022. Pada poin terakhir dinyatakan, Pemkab agar menambah-

kan alokasi BTT dalam APBD TA 2020 sebesar 5 hingga 10 persen, dihitung dari APBD TA 2021. "Pengalokasian yang cukup besar ini sesuai SE Mendagri guna mengantisipasi keadaan darurat. Termasuk keperluan mendesak akibat pandemi Covid-19. Atau bencana lainnya yang tidak bisa diprediksi," sampai Agus.

Hal ini tidak bisa diabaikan. Pasalnya, jika tidak dipatuhi maka akan adanya sanksi dari pemerintah pusat. Bisa saja pengurangan pagu, baik itu dana alokasi umum (DAU) maupun yang lainnya. Atau bisa juga berupa penyaluran transfer dari pusat, terganggu.

"Alokasi ini belum termasuk untuk program mendukung pemulihan ekonomi dan penambahan belanja kesehatan prioritas. Untuk dua ini, Pemkab oleh Kemendagri, harus mengalokasikannya pula dari DAU yang didapat," jelasnya.

Lebih lanjut Agus mengatakan, bahwa pemerintah pusat meminta daerah untuk mengubah budaya kerja seperti pertemuan atau rapat. Memangkas anggaran perjalanan dinas. Selain itu, pengurangan belanja yang tidak efisien dalam belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan dan belanja aparatur. Untuk kemudian dialihkan kepada belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. (tue)